

## TINJAUAN SOSIOLOGIS PERAN PEREMPUAN PESISIR DALAM PEMBANGUNAN DESA SEKOTONG BARAT, LOMBOK BARAT

### *SOCIOLOGICAL REVIEW OF THE ROLE OF COASTAL WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF WEST SEKOTONG VILLAGE, WEST LOMBOK*

Maya Atri Komalasari<sup>1</sup>, Rosiady Husaenie Sayuti<sup>2</sup>, dan Azhari Evendi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sosiologi Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

e-mail: mayaatrikomalasari@unram.ac.id

Diserahkan : 27/10/2022; Diperbaiki : 03/02/2023; Disetujui : 01/03/2023

DOI : 10.47441/jkp.v18i1.298

#### Abstrak

Pembangunan masih mengalami perkembangan negatif yang tampak dari angka kemiskinan dan ketimpangan serta dialami perempuan pesisir Sekotong Barat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat pesisir di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat yang dianalisis dengan teori aksi (voluntarisme) Talcot Parsons. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus intrinsik, data yang dikumpulkan yakni data primer dan sekunder, informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan pesisir dalam pembangunan desa terwujud dalam perannya sebagai pelaksana dan evaluator. Peran sebagai evaluator menunjukkan adanya tindakan dengan aspek voluntarisme. Dalam menjalankan perannya pada pembangunan desa, perempuan pesisir menghadapi berbagai kendala, oleh karena itu perlu dukungan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan komunikasi publik dan penguatan kepercayaan diri perempuan secara psikologis sehingga mereka mampu menyalurkan aspirasinya demi kemajuan dan perkembangan desa.

**Kata Kunci:** Peran, Perempuan Pesisir, Pembangunan Desa

#### Abstract

*Development is experiencing adverse developments, as seen from the poverty and inequality rates experienced by coastal women in West Sekotong. This study aims to describe the role of women in developing coastal communities in West Sekotong Village, West Lombok Regency, which is analyzed with Talcot Parsons' theory of action (voluntarism). The research method used is qualitative intrinsic case studies. The data collected are primary and secondary. Research informants are selected using purposive sampling techniques, a collection using observation, interviews, and documentation, and data analysis using interactive models. The results showed that the role of coastal women in village development is manifested in their roles as implementers and evaluators. The role of an evaluator indicates the presence of action with an aspect of voluntarism. In carrying out their role in village development, women face various obstacles..*

**Keywords:** Role, Coastal Women, Village Development

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada tahun 2021 masih mengalami perkembangan yang negatif. Hal tersebut tampak pada tingkat kemiskinan Indonesia pada periode Maret 2021 sebesar 10,14% atau naik dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 9,78% (Amanda 2021). Perkembangan negatif pembangunan di Indonesia ditunjukkan dengan adanya ketimpangan. Ketimpangan yang diukur dengan rasio gini, diketahui bahwa tingkat ketimpangan pada periode Maret 2021 sebesar 0,384% atau semakin melebar dibandingkan periode Maret 2020 sebesar 0,381% (Amanda 2021). Selain ketimpangan yang ditunjukkan dengan perhitungan ekonomi yakni gini ratio, pembangunan di Indonesia juga menghadapi permasalahan ketimpangan terkait keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih menjadi masalah yang perlu penanganan. Meskipun telah terjadi perkembangan dengan adanya keterlibatan perempuan pada proses atau program-program pembangunan, namun dapat dikatakan masih rendah atau belum optimal (Ahmad 2017); (Manembu 2018); (Muttalib 2018).

Peran perempuan dalam pembangunan desa tampak pada partisipasi atau keterlibatan dalam proses-proses perencanaan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) namun belum optimal. Beberapa bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur seperti partisipasi gagasan, partisipasi tenaga, partisipasi dana, dan juga partisipasi sarana dan prasarana, namun masih mengalami hambatan seperti kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa, ada yang menjadi wanita karir, adanya pandangan masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin, pendidikan, dan pengalaman (Openg, Teguh and Rande 2022). Temuan penelitian di Desa Berakit menunjukkan partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang dominan berada pada level *tokenism* yakni suatu tingkatan partisipasi dalam masyarakat didengarkan dan diperkenankan untuk memberikan pendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan serta pengetahuan yang mumpuni untuk dijadikan sebagai jaminan serta menguatkan bahwa pandangan mereka layak dipertimbangkan oleh pemerintah (Nurhalimah and Edison 2018).

Sumber daya manusia merupakan agen dalam pembangunan, sehingga pentingnya dilakukan pembangunan manusia yang diarahkan untuk mengedepankan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin tertentu agar terwujud kesejahteraan masyarakat (Aini 2021). Jelas bahwa pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan tentu memerlukan peran serta semua pihak termasuk perempuan. Daerah pesisir pun tidak terlepas dari ketimpangan. Desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan realitas yang keberadaannya mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan bila dibandingkan dengan daerah di daratan pada umumnya (Rukin 2020). Sementara itu, perempuan di daerah pesisirpun belum sepenuhnya terlibat pada proses pembangunan. Perempuan-perempuan di daerah pesisir lebih banyak terlibat pada proses pembangunan yang sifatnya ekonomi seperti berperan dalam menghasilkan atau meningkatkan pendapatan keluarga (Djuwita 2015); (Sumrin, Ollie and Baruardi 2015); (Anggraini 2018). Perempuan di daerah pesisir masih menghadapi berbagai kendala, yakni rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya modal, transportasi dan informasi (Sumrin, Ollie and Baruardi 2015). Hal inilah yang dapat mempengaruhi keterlibatan, peran perempuan pesisir.

Istilah peran merujuk pada perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran (Muthiawanti 2017). Berbicara tentang peran (*role*) tidak bisa dilepaskan dalam konteks struktur sosial. Bahkan jika membahas struktur sosial ada dua hal yang tidak bisa dibedakan yakni status dan peran. Menurut Linton, suatu status merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah segi dinamis

suatu status (Sunarto 2018). Dalam perspektif sosiologi, memang status dan peran memiliki keterkaitan dan cenderung tidak terpisahkan. Lebih lanjut menurut Linton, seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya (Sunarto 2018).

Sementara itu, dalam pandangan sosiologis, teori peran atau dikenal dengan *causal role theory* beranggapan bahwa orang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti dikehendaki orang lain, sehingga identitas seseorang dibentuk dalam rangka memberi respons dari perlakuan dan harapan orang lain (Usman 2012). Dari pemaparan terkait teori peran memiliki poin yang penting yang sama yakni peran terkait dengan harapan orang lain atau masyarakat terhadap individu. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat (Usman 2012).

Peran telah memungkinkan orang membangun pola bertingkah laku dan bersikap, dan didalam peran terdapat pula strategi bagaimana seharusnya menguasai berbagai macam situasi (Usman 2012). Permasalahan seputar peran perempuan dalam pembangunan ialah perannya yang belum maksimal dan optimal. Seringkali hal ini terlihat pada masih minimnya peran mereka untuk terlibat. Perempuan yang berasal dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua, tidak pernah terlibat dalam rembug –rembug yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat sehingga kondisi ini seringkali berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya dapat berakibat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada kebutuhan perempuan (Widyawati 2015).

Perencanaan pembangunan desa adalah hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan (Wiguna, Dewi and Angelia 2017). Musrenbang merupakan salah satu sarana dan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Musrenbang desa kemudian memperoleh kekuatan legitimasi dengan kewenangan pengelolaan keuangan desa seperti yang dimanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Razak, Azuz and Ibrahim 2020). Partisipasi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali, termasuk perempuan.

Pembangunan masyarakat pesisir tidak bisa dilepaskan dari peran penting perempuan. Peran penting yang dimaksud terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga, yang dikuatkan oleh temuan-temuan penelitian. Perempuan pesisir mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Kampung Petta, besar kontribusi perempuan pesisir terhadap kebutuhan ekonomi keluarga yaitu sebesar 46,5% (Sopamena 2019). Hasil penelitian lainnya, menunjukkan kontribusi pendapatan wanita pesisir terhadap pendapatan keluarga berkisar antara 32,8% hingga 80,6% dengan rata-rata kontribusi 64,9%, dan berarti bahwa peranan wanita sebagai pelaku ekonomi tidak bisa diabaikan, sehingga diperlukan penguatan kapasitasnya untuk menunjang peran wanita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif (Djunaidah and Nurmalia 2018).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di daerah pesisir berpeluang berperan dalam pembangunan khususnya pada sektor ekonomi. Perempuan pesisir memiliki peran produktif. Perempuan dalam komunitas nelayan memiliki peran produktif yang dilakukan, yakni tidak hanya untuk mencari nafkah tambahan, tetapi juga nafkah utama, dan dilakukan tidak hanya ketika suaminya sedang pergi melaut dalam waktu lama (*longday fishing*) atau sedang tidak bisa melaut karena sakit, tetapi dilakukan kapan saja selama ada kesempatan dan peluang (Indrawasih 2015). Usaha produktif yang dikembangkan istri dan wanita dalam keluarga nelayan di Kabupaten Sidoarjo sangat membantu suami pada saat musim paceklik ikan (Istiqomah 2018).

Talcot Parsons mengembangkan teori aksi yang memfokuskan pada suatu aktivitas, kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Parsons menyusun skema unit unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Adanya individu dengan aktor; (2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu; (3) Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya; (4) Aktor berhadapan dengan sejumlah

kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu; dan (5) Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan (Ritzer 2009). Aktor berupaya mencapai tujuan mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih, dan kemampuan tersebut disebut Parsons sebagai voluntarisme. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (Ritzer 2009). Konsep voluntarisme menunjukkan individu sebagai seorang aktor yang memiliki kehendak, inisiatif dan kreativitas.

Kajian mengenai ketimpangan dan pembangunan pada perempuan di daerah pesisir memang sudah banyak namun fokus atau sorotan utamanya seputar pembangunan ekonomi atau berperspektif ekonomi. Penelitian ini mengkaji terkait agensi perempuan pesisir khususnya perannya dalam pembangunan dengan fokus pada peran perempuan pesisir dalam proses dan program-program pembangunan melalui perspektif sosiologi dengan teori aksi (konsep voluntarisme) Talcot Parsons. Agensi merupakan satu dimensi dari tindakan manusia yang mengandung kreativitas, spontanitas, tak terduga, dsb (Kinseng 2017).

Desa Sekotong Barat menjadi lokasi penelitian karena daerah tersebut masih menghadapi ketimpangan, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Tipologi Klassen menurut pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, Kecamatan yang masuk dalam daerah tertinggal adalah Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Kuripan, sedangkan yang termasuk dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kecamatan Lembar, Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Gerung (Sahar 2018). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sekotong menjadi salah satu daerah yang tertinggal dibanding daerah lain di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui serta menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat pesisir di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih karena daerah tersebut secara geografis merupakan daerah pesisir dan mengalami ketimpangan dalam pembangunan karena menjadi daerah yang tertinggal di Kabupaten Lombok Barat. Waktu penelitian selama 3 bulan dari Juli hingga September 2022. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan tipe studi kasus intrinsik. Sebuah studi kasus penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks di fenomena tersebut terjadi (Prihastanti, Suryanto and Wiwin 2018). Subyek penelitian ini ialah individu yang ditentukan dengan teknik *purposive*. Teknik tersebut mendasari pemilihan informan penelitian yakni perempuan pesisir di Desa Sekotong Barat, Lombok Barat, NTB. Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain: 1). domisili, 2). usia (perempuan usia 18-50 tahun), 3). tingkat pendidikan (minimal lulusan sekolah menengah SMP). Sementara itu, informan kunci juga diperlukan dalam penelitian ini yakni kepala desa wilayah setempat yang mengetahui tentang kondisi sosial perempuan pesisir sehari-hari. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai teknik yang meliputi, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model interaktif (*Interactive Mode of Analisis*) yang melalui berbagai tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sekotong Barat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, yang terletak 10 Km kearah barat dari Kota Kecamatan. Secara geografis Desa Sekotong Barat berbatasan dengan laut sehingga terdapat wilayah pesisir. Kondisi Demografis Desa Sekotong Barat tampak dari jumlah keseluruhan penduduk sebesar 8.781 jiwa yang terdiri dari 4.055 Laki-laki dan 4.736 perempuan (Profil Desa Sekotong Barat 2022). Terkait dengan kondisi ekonomi tampak pada sebagian besar mata pencaharian yang menjadi sumber penghidupan penduduknya yang beragam seperti petani, nelayan, buruh, pedagang, penambang emas serta pekerjaan pada sektor pariwisata. Dari segi sosial, budaya Desa Sekotong Barat termasuk sebagai desa yang heterogen. Beberapa suku dan etnis mendiami wilayah ini. Sekotong Barat terdiri dari tiga etnis yaitu etnis Sasak 6.931 orang, Bali 496 orang, dan Jawa 17 orang (Profil Desa Sekotong Barat 2022).

### Peran Perempuan Pesisir dalam Pembangunan Desa Sekotong Barat, Lombok Barat

Pembangunan adalah suatu proses yang panjang dan kompleks. Pembangunan melibatkan banyak aspek dan tentu seharusnya melibatkan seluruh masyarakat. Begitupun pembangunan di pedesaan yang perlu melibatkan seluruh warga desa tanpa kecuali terutama perempuan, terlebih khusus Desa Sekotong Barat yang secara statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Dari data penduduk diketahui keseluruhan jumlah penduduk sebesar 8.781 jiwa yang terdiri dari 4.055 Laki-laki dan 4.736 perempuan (Profil Desa Sekotong Barat 2022).

### Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Desa Sekotong Barat

Salah satu aspek yang dapat dilihat dalam pembangunan desa adalah perencanaan. Pada level desa, perencanaan tersebut terwujud pada musrenbang. Pelaksanaan musrenbang di Desa Sekotong Barat telah dilakukan secara rutin tiap tahun. Kegiatan tersebut diikuti oleh perangkat desa serta berbagai perwakilan organisasi dan lembaga di desa. Perempuan di Desa Sekotong Barat terlibat pada musrenbang sebagai peserta. Perempuan yang menjadi peserta musrenbang ialah perwakilan dari organisasi atau lembaga di desa yang banyak diikuti oleh perempuan yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Mereka mendapatkan undangan untuk menghadiri musrenbang desa. Dari sejumlah kader PKK dan Posyandu, hanya beberapa orang yang mendapatkan undangan pada musrenbang. Umumnya mereka yang diundang adalah ketua atau perwakilan dari PKK dan Posyandu. Salah seorang informan yang merupakan perwakilan kader Posyandu dan PKK datang dan diundang sebagai pada kegiatan musrenbang desa. Berikut keterangan salah seorang informan:

*"Iya pernah ikut (musrenbang desa), ya sebagai kader"*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Ana, 40 tahun, Ibu Rumah Tangga)

Umumnya perempuan yang merupakan perwakilan atau kader PKK dan Posyandu mengetahui agenda musrenbang desa. Mereka mengetahui isu-isu atau masalah seputar pembangunan desa, namun tidak semua kader atau anggota/pengurus PKK maupun posyandu mengikuti kegiatan musrenbang desa. Hal itu dikuatkan oleh keterangan informan sebagai berikut :

*"Saya gak ikut sih, biasanya ketuanya aja, ketua BUMDES, ketua kader (posyandu) seperti itu kan. Saya kan cuma anggota aja kan"*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Yeny, 33 tahun, Karyawan)

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kader PKK dan Posyandu mengetahui agenda dan isu-isu seputar musrenbang. Selain itu, mereka juga mengetahui program-program pembangunan di desa. Namun begitu, yang membedakan ialah hanya ketua kader saja yang mendapatkan undangan sebagai peserta musrenbang desa. Informasi terkait agenda dan isu-isu dalam musrenbang desa mereka peroleh dari komunikasi dengan sesama kader secara langsung maupun melalui komunikasi via media sosial seperti *WhatsApp group* organisasi atau lembaga.

Kondisi berbeda dialami perempuan yang bukan kader PKK maupun posyandu yang tidak mengetahui agenda dan isu-isu seputar musrenbang. Selain itu, mereka tidak mendapatkan undangan sebagai peserta musrenbang desa. Hal itu dikuatkan oleh keterangan informan beberapa informan utama dan informan kunci sebagai berikut:

*"Gak pernah ikut (musrenbang desa)"*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Arifah, 49 tahun, Pedagang)

*"Saya tidak mengikuti kegiatan yang seperti ditanyakan (musrenbang desa), jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang lebih tau kader disini untuk jawab"*

(Wawancara, 11 September 2022, Informan Aisyah, 23 tahun, Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD)

*"Pada penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tidak mungkin kita mengundang semua perempuan kan, karenanya ada wadah kan PKK juga posyandu juga wadah kan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) juga wadah, karang taruna juga wadah. Nah memang tempat yang paling banyak perempuannya itu wadahnya di PKK nah posyandu, nah itu tetep (diundang). Ketika kita menyusun perencanaan dalam hal ini adalah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tiap tahun itu kan turunan dari RPJM itu selalu kita undang yang wadahnya itu bukan langsung semuanya perempuan bukan, wadahnya PKK itu kan"*

(Wawancara, 3 September 2022, 32 tahun, Informan Kunci: Nurul Hakim, Sekretaris Desa Sekotong Barat).

Keterlibatan perempuan Desa Sekotong pada perencanaan pembangunan tampak pada musrenbang desa. Terdapat perbedaan yang mencolok antara perempuan yang merupakan kader PKK dan Posyandu dan perempuan yang bukan merupakan kader. Kader PKK dan Posyandu mengetahui permasalahan, program-program pembangunan desa yang biasanya menjadi bahasan dalam musrenbang desa. Kondisi sebaliknya dialami perempuan yang bukan merupakan kader sehingga mereka mengalami kurangnya akses informasi terkait permasalahan, program-program pembangunan desa secara umum dan yang dibahas dalam musrenbang desa secara khusus.

**Tabel 1. Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Desa Sekotong Barat**

No	Status	Akses Informasi (agenda dan isu) Musrenbang	Undangan Mengikuti Musrenbang	Partisipasi pada Musrenbang
1	Bukan kader PKK, Posyandu	Tidak mampu mengakses	Tidak dapat undangan	Tidak ada
2	Kader PKK, Posyandu	Mampu mengakses	Mendapatkan undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi peserta musrenbang desa</li> <li>• Memberikan aspirasi terkait kegiatan PKK dan Posyandu</li> </ul>

Sumber: data primer penelitian yang diolah

### Berbagai Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa

Peran perempuan dalam pembangunan desa di Sekotong Barat ditunjukkan pada lembaga atau organisasi yang anggotanya sebagian besar dan hampir semuanya perempuan yakni PKK dan Posyandu. PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa (Putri and Jatningsih 2020). PKK menunjang pembangunan desa melalui pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, pangan, kesehatan yang tercermin pada Program kerja (pokja) PKK. Sementara itu, Posyandu jelas menunjang pembangunan terutama menasar pembangunan manusia yang berfokus pada kualitas kesehatanarganya. Kader posyandu berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat di desa, sebab kader dapat membantu mobilisasi sumber daya masyarakat, mengadvokasi masyarakat serta membangun kemampuan lokal (Tse, Suprojo and Adiwidjaja 2017).

Para kader, anggota ataupun pengurus PKK dan posyandu memiliki peran dalam pembangunan desa. Peran dalam hal ini mereka semua menjadi pelaksana dari program-program pembangunan terutama yang ada dan dilakukan melalui PKK dan posyandu. Berbagai program pada posyandu yang dilakukan ialah posyandu anak dan posyandu keluarga. Sementara program-program pada PKK mencakup berbagai pelatihan yang diselenggarakan seperti pelatihan membuat kerajinan tangan hingga pelatihan keterampilan untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat seperti penanaman sayur dengan hidroponik, pembuatan arang briket dan sebagainya. Hal tersebut diungkapkan oleh para informan melalui keterangannya sebagai berikut:

*” Saya (aktif) di PKK sama Kader (Posyandu). Posyandu sebenarnya disini kita sudah punya surat kayak apa namanya ketetapan untuk posyandu keluarga sudah ada, khusus di posyandu kita. Dulu kita sendiri yang pertama kali kan, di posyandu kita di Posyandu Mawar. (Posyandu) Anak, remaja, lansia, ada posbindu juga, usia 13 tahun keatas sampai berapa ya umumnya 40, kalau gak salah. Sebelum lansia dah. Ada cek kesehatan, cek gula darah, dan sebagainya disana. Kadang ada puskesmas kelilingnya ikut, ngasih obat nanti kalau ada keluhan gitu. Heeh pasti (Posyandu tiap sebulan sekali), kalau disini biasanya tanggalnya 17 ke atas tergantung tugasnya nanti kan ada kendala atau tidaknya*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Yeny, 33 tahun, Karyawan).

Adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bekerjasama dengan PKK turut membantu peran perempuan terutama sebagai pelaksana dalam proses dan kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Berbagai universitas di level regional maupun nasional mengadakan KKN di Desa Sekotong Barat. Hasil observasi peneliti di lapangan

menunjukkan adanya kegiatan PKK yang melibatkan kerja sama dengan mahasiswa KKN. Salah satu kelompok mahasiswa KKN yang dimaksud berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang mengadakan berbagai pelatihan bersama kader PKK dan warga sekitar terkait pembuatan *nugget*, pembuatan briket, pewarnaan dengan metode *ecoprint* hingga penanaman tanaman obat keluarga (toga) dan penanaman sayuran dengan metode hidroponik. Hal tersebut dipaparkan oleh keterangan salah seorang informan sebagai berikut:

*"Pelatihan seperti bikin nugget terus bikin apa itu yang arang itu, ntar dulu saya buka saya lupa, ntar-ntar saya lupa, briket. Briket yang dari arang kan trus diolah, ada contohnya saya bawa. Briket itu yang untuk bakar-bakar. Ini semacam ini briketnya (sambil menunjukkan) dari areng trus ee, itu tanaman dari kangkung hidroponik itu, itu juga dari (KKN) UGM, ini juga dari UGM kita dapat, trus toga (Tanaman obat keluarga) kayak apotek hidup kayak gitu kita semua dapat dari pelatihan UGM itu."*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Ana, 40 tahun, Ibu Rumah Tangga).

Peran perempuan sebagai pelaksana pembangunan dapat dilakukan oleh kader maupun yang bukan kader PKK dan Posyandu. Umumnya, anggota PKK merupakan perempuan daerah setempat sehingga mereka terlibat pada kegiatan-kegiatan yang termasuk program pembangunan desa. Oleh karena itu, peran sebagai pelaksana pembangunan relatif sudah banyak dilakukan.

Selain memiliki peran sebagai pelaksana pembangunan desa, perempuan di Desa Sekotong Barat juga telah ada yang berperan sebagai evaluator dalam pembangunan desa. Evaluator itu ialah orang yang melakukan aktifitas menilai (*valuing*) pada temuan mereka (Hajaroh 2018). Evaluasi menjadi kegiatan atau proses yang penting pada proses pembangunan atau kebijakan. Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program atau dengan kata lain evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya (Hajaroh 2018).

Peran sebagai evaluator dalam pembangunan desa ditunjukkan dengan memberikan aspirasi, kritik, masukan dan saran mereka terkait program-program baik PKK maupun Posyandu yang mereka laksanakan. Sebagai evaluator, perempuan dalam hal ini melihat, mengidentifikasi permasalahan yang dialami pada kegiatan atau program tersebut lalu menilai dan memberikan masukan, kritik dan saran tersebut pada pimpinan organisasi kemasyarakatan hingga pihak desa. Proses penyaluran aspirasi, masukan, kritik tersebut dilakukan perempuan baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media elektronik atau media sosial (*Facebook* dan *Whatsapp group*). Terdapat saluran atau media untuk menyampaikan informasi bagi perempuan terutama para kader/anggota/pengurus PKK dan Posyandu yakni dengan *Whatsapp group* yang beranggotakan mereka beserta pihak desa (Kepala dan Sekretaris desa).

Informan pada penelitian ini mengutarakan keterangannya bahwa mereka sempat memberikan aspirasinya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PKK dan Posyandu pada pihak desa. Informan juga mengkritisi kegiatan dalam Posyandu yang dinilai belum sesuai misalnya honor bagi kader posyandu yang belum mendapatkan kenaikan. Berikut keterangan yang disampaikan oleh informan:

*"Banyak (memberikan masukan), kalau saya sih timbangan saya kan sudah rusak, timbangan ibu hamilnya sudah rusak trus timbangan anak kecilnya juga sudah lama sekali, lama banget dari tahun 2010 kalau ndak salah timbanganya udah berapa tahun, udah agak erorr erorr dikit nah itu yang saya usulkan. Sama mejanya, sama meja kita butuh 5 meja tapi dikasih 3 meja."*



*Alhamdulillah sih udah, cuma timbangannya yang masih kurang. Sering kita usulkan, trus kebanyakan ibu-ibunya requestnya honor naik honor naik (tertawa) sedangkan di tempat lain udah (naik honor) 150 ribu, kalau di desa kita itu 100 ribu. Makanya apa complain semua kan, makanya pada cuma Desa Sekotong Barat aja kan yang masih 100 ribu. Tapi mungkin kita gak tau karena apa mungkin karena posyandunya yang terlalu banyak kita ndak tau”.*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Ana, 40 tahun, Ibu Rumah Tangga).

Peran sebagai evaluator lebih banyak dilakukan oleh kader PKK dan Posyandu. Hal tersebut disebabkan mereka memiliki akses dan keterlibatan pada musrenbang desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak perempuan yang menjadi evaluator. Meskipun semua kader atau anggota/pengurus organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan posyandu memiliki akses terhadap informasi dan program-program pembangunan desa namun tidak semuanya berperan sebagai evaluator. Peran perempuan pesisir Desa Sekotong Barat dalam pembangunan desa tercermin dengan adanya perempuan yang berperan sebagai pelaksana dan sebagai evaluator dalam proses pembangunan terutama pada kegiatan PKK dan Posyandu. Keduanya, PKK dan posyandu menjadi sarana dan media yang menaungi perempuan pesisir untuk berperan dalam pembangunan di desa.

Peran perempuan di Sekotong Barat masih sebatas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Peran tersebut juga masih mengalami hambatan atau kendala yang dialami. Hambatan atau kendala yang dimaksud ialah menyangkut semangat partisipasi perempuan yang masih belum maksimal dan cenderung kurang. Motivasi perempuan untuk mengikuti kegiatan PKK dan Posyandu masih fluktuatif, dan tidak jarang banyak memilih tidak mengikuti secara aktif dan rutin. Hal tersebut diungkapkan dari keterangan salah seorang informan sebagai berikut:

*”Kurang tau juga saya PKKnya itu bagaimana ya, padahal kita pakai undangan resmi terus e tapi kayaknya beraaaaat ya untuk hadir itu padahal kita penting gitu. Kalau dia menceh-menceh (meremehkan atau kurang serius) kayak kemarin, kan ada undangan dari mahasiswa KKN itu kan untuk pelatihan ini pelatihan itu ndak ada satupun yang hadir, paling saya tarik yang dekat-deket saja baru, paling saya masyarakat itu yang saya tarik yang jadi peserta.”*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Ana, 40 tahun, Ibu Rumah Tangga).

Kendala berikutnya yang membuat peran perempuan pesisir di Desa Sekotong yang belum maksimal ialah terkait masalah kesesuaian jadwal dan waktu. Hal ini terkait dengan pekerjaan domestik yang dikerjakan perempuan, serta pekerjaan publik (bekerja) di luar rumah yang juga dilakukan oleh perempuan. Perempuan kesulitan berpartisipasi pada kegiatan, program-program pembangunan desa jika acara tersebut dilakukan secara mendadak. Hal tersebut dikuatkan oleh penuturan salah seorang informan berikut ini:

*”Mau (mengikuti kegiatan atau program pembangunan desa) yang penting itu dah jangan mendadak. Karena mereka kan ada kegiatan lain kadang ada yang kerja”*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Yeny, 33 tahun, Karyawan).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa kesesuaian waktu menjadi kendala perempuan berperan dalam pembangunan desa. Hal tersebut, sejalan dengan hasil penelitian terkait partisipasi perempuan di Kabupaten Pidie, Aceh dalam musyawarah desa membahas LPJ (laporan pertanggungjawaban desa) sangat minim disebabkan karena agenda musyawarahnya sering diadakan malam hari serta perempuan juga kerap tidak diundang dalam musyawarah tersebut (Manzakiri 2019). Sementara itu,

peran perempuan di Desa Sekotong Barat yang belum maksimal juga turut terkendala dengan masih adanya beban ganda yang dialami oleh perempuan. Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya (Hidayati 2015). Beban ganda masih menjadi masalah karena konstruksi masyarakat yang menganggap bahwa peran perempuan pada kegiatan domestik seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan rumah tangga dianggap sebagai mutlak pekerjaan dan tanggung jawab perempuan, sehingga ketika perempuan akhirnya memilih bekerja di sektor publik maka tanggung jawab atau beban tersebut tetap ditanggung perempuan. Penelitian lain pun menunjukkan bahwa perempuan di pesisir akrab dengan beban ganda seperti perempuan nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur mempunyai kedudukan dan peranan sosial yang penting, baik disektor domestik maupun disektor publik (Rostiyati 2018).

Berdasarkan hasil observasi, pada saat berlangsung kegiatan PKK pada saat pagi hari sekitar pukul 9.00 pagi WITA tampak bahwa tidak semua perempuan bisa mengikuti. Realitas tersebut terkait dengan adanya beban ganda yang masih ditemui. Beban ganda atau *double borden* tersebut memang tidak dialami oleh semua perempuan disana, namun beberapa perempuan yang bekerja (di sektor publik) masih dan tetap memikul beban pekerjaan domestik. Hal itu makin membebani mereka ketika ada acara desa yang sifatnya mendadak. Pemaparan tersebut dikuatkan dengan penuturan salah seorang informan berikut ini:

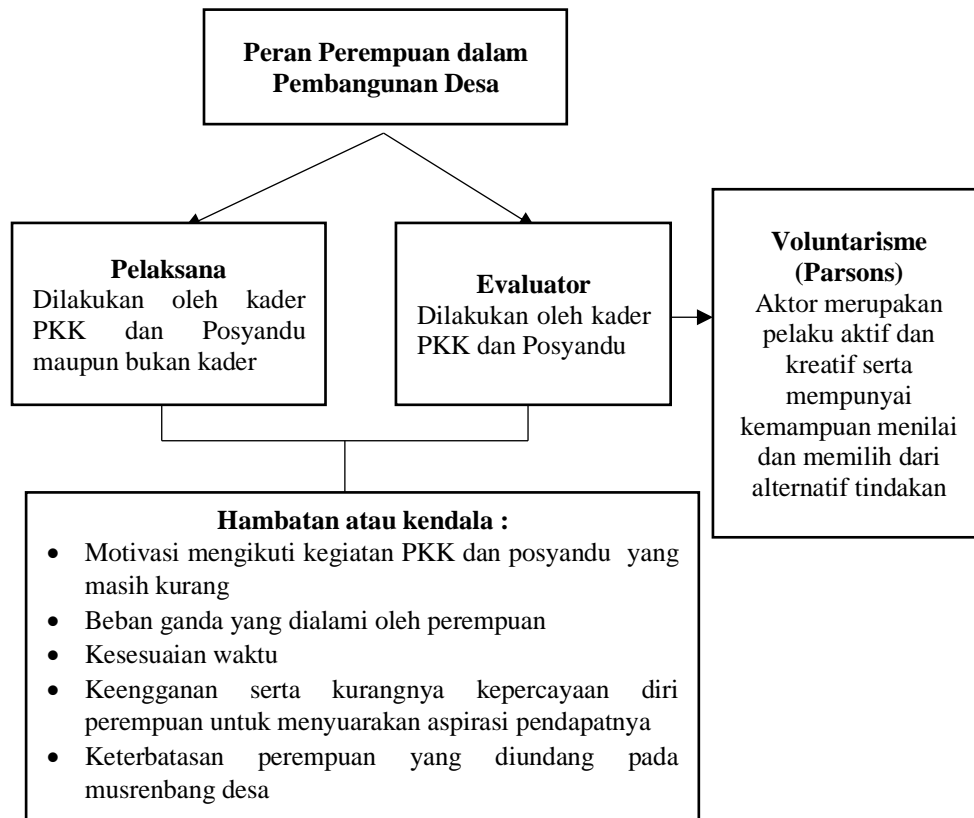
*" Kalau disini istilahnya perempuan sini kan gak terikat kan, dibebaskan berusaha sama suami yang penting dia masih ngurus keluarga, mereka yang penting keluarganya gak diabaikan karena banyak yang jualan dan sebainya yang penting tidak mengabaikan anak dan keluarga".*

(Wawancara, 6 Agustus 2022, Informan Yeny, 33 tahun, Karyawan).

Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara diketahui bahwa beban ganda masih dialami sejumlah perempuan di Sekotong Barat, khususnya perempuan yang bekerja pada sektor informal disana, seperti banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Waktu berdagang mereka dari pagi hingga sore hari, sehingga sering mereka kesulitan jika ingin mengikuti kegiatan PKK atau Posyandu di pagi hari. Kendala perempuan untuk berperan sebagai evaluator dalam pembangunan desa disebabkan beberapa faktor. Pertama, masih adanya keengganan serta kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk menyuarakan aspirasi pendapatnya. Kedua, keterbatasan perempuan yang diundang pada musrenbang desa juga menjadi penyebab. Umumnya, peran sebagai evaluator pembangunan lebih sering dilakukan oleh kader PKK dan posyandu.

Peran perempuan dalam pembangunan desa sebagai evaluator menunjukkan adanya upaya mereka menjadi subyek. Konsep Voluntarisme dalam teori Parsons, memandang sifat proaktif sebagai kemampuan individu sebagai aktor penggerak ataupun agensi yang berani melakukan tindakan-tindakan secara sukarela sesuai kapasitasnya (Asrawijaya 2021). Dalam hal ini, perempuan yang merupakan kader PKK dan Posyandu yang berperan sebagai pelaksana dan evaluator pembangunan desa yang melakukan tindakan dengan aspek voluntarisme. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya (Muarifah 2014). Kader PKK dan Posyandu yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan musrenbang desa sebagai evaluator menunjukkan hal tersebut. Dalam perannya sebagai evaluator, mereka menggunakan alat atau cara alternatif yang mereka gunakan yakni keterlibatan pada musrenbang desa. Keterlibatan tersebut merupakan cara agar tujuan mereka mampu terpenuhi. Salah seorang kader mengusulkan kebutuhan-kebutuhan dalam menunjang kegiatan Posyandu ketika berlangsung musrenbang. Keterlibatan tersebut juga menunjukkan bahwa mereka merupakan aktor yang aktif, proaktif menyuarakan aspirasi mereka dan berusaha mencapai tujuannya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi

yang mendukungnya. Aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan, meski berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor (Muarifah 2014).



Gambar 1. Temuan Hasil Penelitian Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Sekotong Barat

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### SIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan desa terlihat dari keikutsertaannya pada musrenbang desa, namun tidak semua perempuan mendapatkan undangan untuk mengikutinya. Undangan mengikuti musrenbang desa ditunjukkan pada perwakilan dari organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan posyandu. Peran perempuan pesisir Desa Sekotong Barat dalam pembangunan desa tercermin dengan adanya perempuan yang berperan sebagai pelaksana dan sebagai evaluator. Sebagai pelaksana, perempuan melaksanakan dari program-program pembangunan terutama yang ada dan dilakukan oleh kader PKK dan Posyandu maupun perempuan yang bukan kader. Sebagai evaluator, dilakukan oleh kader PKK dan Posyandu dengan memberikan aspirasi, kritik, masukan dan saran mereka terkait program-program yang mereka laksanakan. Peran sebagai evaluator menunjukkan adanya tindakan dengan aspek voluntarisme. Peran perempuan pesisir dalam pembangunan tersebut masih terbatas masih menghadapi berbagai kendala seperti: semangat atau motivasi berpartisipasi perempuan yang masih kurang, masalah kesesuaian waktu, dan masih adanya beban ganda yang dialami beberapa perempuan khususnya yang bekerja (sektor publik), adanya keengganan serta kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk menyuarakan aspirasi pendapat serta keterbatasan perempuan yang diundang pada musrenbang desa.

## REKOMENDASI

Pembangunan pedesaan di kawasan pesisir hakikatnya melibatkan semua pihak tanpa kecuali, terutama perempuan. Kesempatan perempuan untuk dapat berperan dalam berbagai organisasi masyarakat pada level desa juga memerlukan perluasan. Oleh karena itu, hendaknya sarana atau wadah bagi perempuan pesisir berperan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada PKK dan Posyandu saja. Peran perempuan pesisir dalam pembangunan perlu dukungan dengan memberikan kesempatan perempuan pesisir untuk meningkatkan kapasitasnya dengan berbagai cara seperti: memberikan pendidikan, pelatihan komunikasi publik, penguatan kepercayaan diri perempuan secara psikologis sehingga mereka mampu menyalurkan aspirasinya demi kemajuan dan perkembangan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Program Studi Universitas Mataram atas dukungan finansial pada penelitian ini. Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian disana sekaligus mengambil data terkait penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. 2017. *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Studi Gender Tentang Keterlibatan Perempuan Pada Musrenbangdes Di Desa Blayu Dan Di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*. Magister Thesis, Malang: Universitas Brawijaya.
- Aini, A.N. 2021. "Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019." *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 16, No.1 77-91.
- Amanda, G. 2021. *Menko PMK: Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Nasional Masih Meningkat*. Jakarta, 29 Desember.
- Anggraini, Y. 2018. "Peran Perempuan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Desa Bayah Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak ." *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol. 13, No. 1 97-106.
- Asrawijaya, E. 2021. "Konsep Voluntarisme Dalam Gerakan Samin Tolak Pabrik Semen ." *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.10, No.2 144-156.
- Djunaidah, I.S, and N Nurmalia. 2018. "Peran Produktif Wanita Pesisir Dalam Menunjang Usaha Perikanan Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol.13, No.2 229-237.
- Djuwita, D. 2015. "Peran Perempuan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Desa Mertasinga." *Journal Al Amwal*, Vol. 7, No.2 144-155.
- Hajaroh, M. 2018. "Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai Dan Menilai, Penggunaan)." *Foundasia*, Vol. IX, No.1 27-42.
- Hidayati, N. 2015. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)." *MUZAWAH*, Vol.7, No. 2 108-119.
- Indrawasih, R. 2015. "Peran Produktif Perempuan dalam Beberapa Komunitas Nelayan di Indonesia ." *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 17, No.2 249-264.
- Istiqomah, T. 2018. "Analisis Gender Peran Wanita Sebagai Stimulator Ekonomi Keluarga Nelayan di Pesisir Kabupaten Sidoarjo." *Fish Scientiae*, Vol.8, No.1 25-37.
- Kinseng, R.A. 2017. "Strukturgensi: Sebuah Teori Tindakan." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 7, No. 1 127-137.

- Manembu, A.E. 2018. "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)." *JURNAL POLITICO*, Vol. 7, No. 1 1-28.
- Manzakiri, M. 2019. "Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kelawat Kabupaten Minahasa Utara)." *AL-IJTIMA I-International Journal of Government and Social Science*, Vol.5, No.1 81-105.
- Muarifah, S. 2014. "Model Partisipasi Guru Perempuan Dalam Berpolitik: Studi Kasus Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Gresik." *PALASTREN*, Vol.7, No. 2 369-396.
- Muthiawanti. 2017. "Tantangan "Role" Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia." *Jurnal AL AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2 104-114.
- Muttalib, A. 2018. "Studi Deskriptif Peran Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Mataram." *JIME* Vol. 4, No. 1 250-261.
- Nurhalimah, A, and Edison. 2018. "Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 6, No.2 35-54.
- Openg, E.N.B., C.P. Teguh, and S. Rande. 2022. "Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur." *eJournal Administrasi Publik*, Vol.9, No. 2 5625-5635.
- Prihastanti, U, Suryanto, and H Wiwin. 2018. "Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah Dalam Psikologi." *Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2 126-136.
2022. *Profil Desa Sekotong Barat*. Pemerintah Desa Sekotong Barat.
- Putri, C.S, and O Jatiningsih. 2020. "Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 08, No. 03 887-901.
- Razak, T.S, S Azuz, and S Ibrahim. 2020. "Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan." *PALLANGGA PRAJA*, Vol. 2, No.2 149-162.
- Ritzer, G. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rostiyati, A. 2018. "Peran Ganda Perempuan Nelayan Di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur." *Patanjala*, Vol.10, No.2 187-102.
- Rukin. 2020. "Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan." *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 2 1-14.
- Sahar. 2018. "Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi*, Vol.4, No,2 154-168.
- Sopamena, J.F. 2019. "Peran Gender Dalam Rumah tangga Masyarakat Pulau Kecil (Studi Kasus Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon ." *Jurnal Agribisnis Terpadu*, Vol. 12, No. 1 72-86.
- Sumrin, A.H Olih, and A.S.R Baruardi. 2015. "Studi Peran Perempuan Pesisir Dalam Menunjang Aktivitas Perikanan Di Desa Torosiaje Laut Kecamatan Popayato Kabupaten Pahuwato." *Nike: Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, Vol.3, No.1 16-19.
- Sunarto, K. 2018. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tse, A.D.P, A Suprojo, and I Adiwidjaja. 2017. "Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat ." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.6, No.1 60-62.
- Usman, S. 2012. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

- Widyawati, E. 2015. "Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus Pada Bkm Desa Umbulmartani Dan Jogotirto." *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta. 566-578.
- Wiguna, Y.T, R. Dewi, and N Angelia. 2017. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa." *PERSPEKTIF*, Vol.6, No.2 41-52.